

# LAPORAN KINERJA

## INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2025



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK,  
DAN PERSANDIAN KABUPATEN SERANG

## KATA PENGANTAR

Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2025, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun 2025 yang dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026. RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026 memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan kegiatan kepemerintahan termasuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di dalam upaya memenuhi visi Kabupaten Serang, yaitu: "***Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia***"

Berdasarkan RPJMD Tahun 2021 - 2026 disusunlah Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026. Renstra menjabarkan Rencana Kerja Tahunan, yang didalamnya menguraikan beberapa persoalan yang dirumuskan dalam isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yaitu; (1) Terwujudnya Kabupaten Serang *Smart City* melalui strategi pelayanan berbasis *Information Communication Technology* (ICT) yang terintegrasi dengan arah kebijakan integrasi pelayanan di seluruh instansi pemerintahan, sebagai *leading sector* dilaksanakan oleh urusan Komunikasi dan Informatika serta didukung oleh semua urusan pemerintahan lainnya; (2) Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah; (3) Peningkatan implementasi *e-Government* Pemerintah Daerah; (4) Pengembangan pusat data yang aman dan handal; (5) Koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika secara terpadu dan berkesinambungan; (6) Integritas dan kemampuan SDM dalam pengembangan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (7) Sinkronisasi komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (8) Simplifikasi mekanisme dan prosedur komunikasi dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Selama tahun 2025, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam RPJMD, RENSTRA, RKPD, Rencana Kinerja (RENJA) dan Program Kerja Tahun 2025 pada umumnya telah berhasil dicapai. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang untuk tahun 2025 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

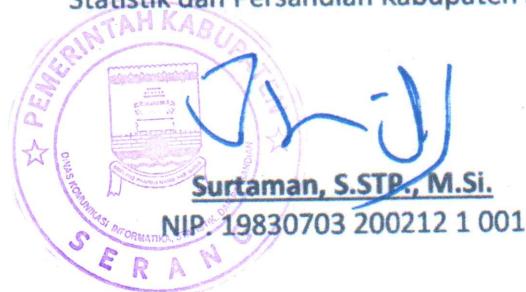
Dasar hukum tersebut memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh. Dalam hal ini, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Pemerintah Kabupaten Serang dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Untuk memenuhi kedua fungsi utama itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja (realisasi kinerja) untuk Tahun Anggaran 2025. Capaian Kinerja (*performance results*) merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2025 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja 2025. Penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada para *stakeholders*. Kemudian, capaian kinerja yang memenuhi sasaran maupun yang tidak memenuhi sasaran akan dianalisis lebih lanjut bagi tujuan identifikasi peluang perbaikan kinerja yang dapat dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Di sini, informasi kinerja yang ada sepenuhnya akan dimanfaatkan oleh kami untuk perbaikan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang dalam upaya pemenuhan visi dan misinya.

Akhirnya, kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat menjadi media pertanggungjawaban Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang.

Serang, Januari 2026

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,  
Statistik dan Persandian Kabupaten Serang



## DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. Deskripsi Umum Organisasi .....	1
2. Isu Strategis/Permasalahan Utama .....	1
3. Struktur Organisasi .....	3
4. Sistematika Penyajian.....	3
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>5</b>
1. Rencana Kinerja 2025 .....	5
2. Program dan Kegiatan Tahun 2025 .....	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>17</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	17
1. Skala Capaian Kinerja Tahun 2025.....	17
2. Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun 2025 .....	18
3. Membandingkan Antar Realisasi Serta Capaian Kinerja Tahun 2025	19
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 ....	20
5. Membandingkan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota 2025 .....	21
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.....	22
7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	23
8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	23
B. Realisasi Anggaran.....	32
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	32
2. Program Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik..	33
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika .....	33
4. Program Penyelenggaran Statistik Sektoral Daerah.....	33
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	34

<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>45</b>
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran .....	46
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>47</b>
• Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	47

## DAFTAR GAMBAR

Hal.

**GAMBAR 1.**Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kab. Serang ..... 3

**GAMBAR 2.** Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian Kabupaten Serang ..... 4

## DAFTAR TABEL

### Halaman

TABEL 1. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2025 .....	8
TABEL 2. Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025.....	9
TABEL 3. Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 .....	10
TABEL 4. Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025.....	14
TABEL 5. Empat Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2025 .....	16
TABEL 6. Skala Capaian Kinerja Tahun 2025 .....	17
TABEL 7. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	18
TABEL 8. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir .....	19
TABEL 9. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi .....	20
TABEL 10. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota .....	21
TABEL 11. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan .....	22
TABEL 12. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	23
TABEL 13. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	23
TABEL 14. Daftar Alokasi Rencana dan Realisasi Anggaran .....	34
TABEL 15. Presentase Daya Serap Berdasarkan Program .....	44

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang melaporkan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2025 dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026.

Sesuai dengan Rencana Kinerja 2025 yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang merencanakan 5 Program, 13 Kegiatan, dan 46 sub kegiatan dengan total anggaran pagu Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.409.900.000,-, Belanja Barang dan Jasa Rp. 16.500.477.795,-, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 2.062.554.313,- dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 1.600.000,- . Dengan demikian total anggaran belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 23.974.532.108,- (setelah perubahan) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD-P) Kabupaten Serang Tahun 2025.

Capaian Kinerja selama tahun 2025 menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang berhasil memenuhi sasaran strategis yang ditargetkan, dengan capaian kinerja organisasi sebesar 87.87%. Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah Terlaksananya Layanan Informasi Publik Secara Tepat, Cepat, Efektif dan Efisien, Meningkatnya infrastruktur IT dan SDM Telematika dalam penerapan *e-Government/SPBE*, dan Terlaksananya penguatan basis data pemerintahan yang terintegrasi dengan Pusat Data serta Dukungan Pengamanan Informasi dan Persandian. Diharapkan di masa yang akan datang pencapaian sasaran strategis sesuai dengan rencana strategis dapat lebih ditingkatkan dengan dukungan anggaran yang lebih meningkat lagi.

**1. Deskripsi Umum Organisasi**

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang merupakan salah satu Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang mempunyai tugas pokok:

- a. Unsur penunjang Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan urusan Pemerintahan Daerah bidang komunikasi dan informasi publik, aplikasi dan teknologi informatika, persandian dan data statistik;
- b. Pengkoordinasian urusan Pemerintahan Daerah bidang komunikasi dan informasi publik, aplikasi dan teknologi informatika, persandian dan data statistik;
- c. Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan pelayanan bidang komunikasi dan informasi publik, aplikasi dan teknologi informatika, persandian dan data statistik;
- d. Pengelolaan data dan pelaksanaan kegiatan urusan Pemerintahan Daerah dan pelayanan bidang komunikasi dan informasi publik, aplikasi dan teknologi informatika, persandian dan data statistik;
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

**2. Isu Strategis / Permasalahan Utama**

Isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian antara lain;

1. Terwujudnya Kabupaten Serang *Smart City* melalui strategi pelayanan berbasis *Information Communication Technology (ICT)* yang terintegrasi dengan arah kebijakan integrasi pelayanan di seluruh instansi pemerintahan, sebagai *leading sector* dilaksanakan oleh urusan Komunikasi dan informatika serta didukung oleh semua urusan pemerintahan lainnya;
2. Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah;

3. Peningkatan implementasi *e-Government* Pemerintah Daerah;
4. Pengembangan pusat data yang aman dan handal;
5. Koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika secara terpadu dan berkesinambungan;
6. Integritas dan kemampuan SDM dalam pengembangan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Sinkronisasi komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Simplifikasi mekanisme dan prosedur komunikasi dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Adapun permasalahan pembangunan berdasarkan isu strategis Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat terdiri dari :

- A. Isu strategis: Ketersediaan dan kualitas data statistik pembangunan yang lengkap dan terkini. Ketersediaan dan kualitas data statistik yang lengkap dan terkini sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan belum memadai.
- B. Isu strategis: Optimalisasi Pemanfaatan Persandian. Belum optimalnya pemanfaatan implementasi persandian dalam penyelenggaraan pemerintahan
- C. Isu strategis: Pengembangan *e-Government*.
  1. Belum optimalnya pemanfaatan sistem jaringan kominfo;
  2. Belum memadainya kapasitas dan kualitas SDM kominfo;
  3. Belum optimalnya pengembangan *e-Government*.

Sedangkan permasalahan utama berdasarkan Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

**A. Komunikasi dan Informatika**

1. Belum optimalnya pemanfaatan sistem jaringan kominfo;
2. Belum memadainya kapasitas dan kualitas SDM Kominfo;
3. Belum optimalnya pengembangan *e-Government*.

**B. Statistik**

Ketersediaan dan kualitas data statistik yang lengkap dan terkini sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan belum memadai.

**C. Persandian**

Belum optimalnya pemanfaatan implementasi persandian dalam hal penyelenggaraan pemerintahan.

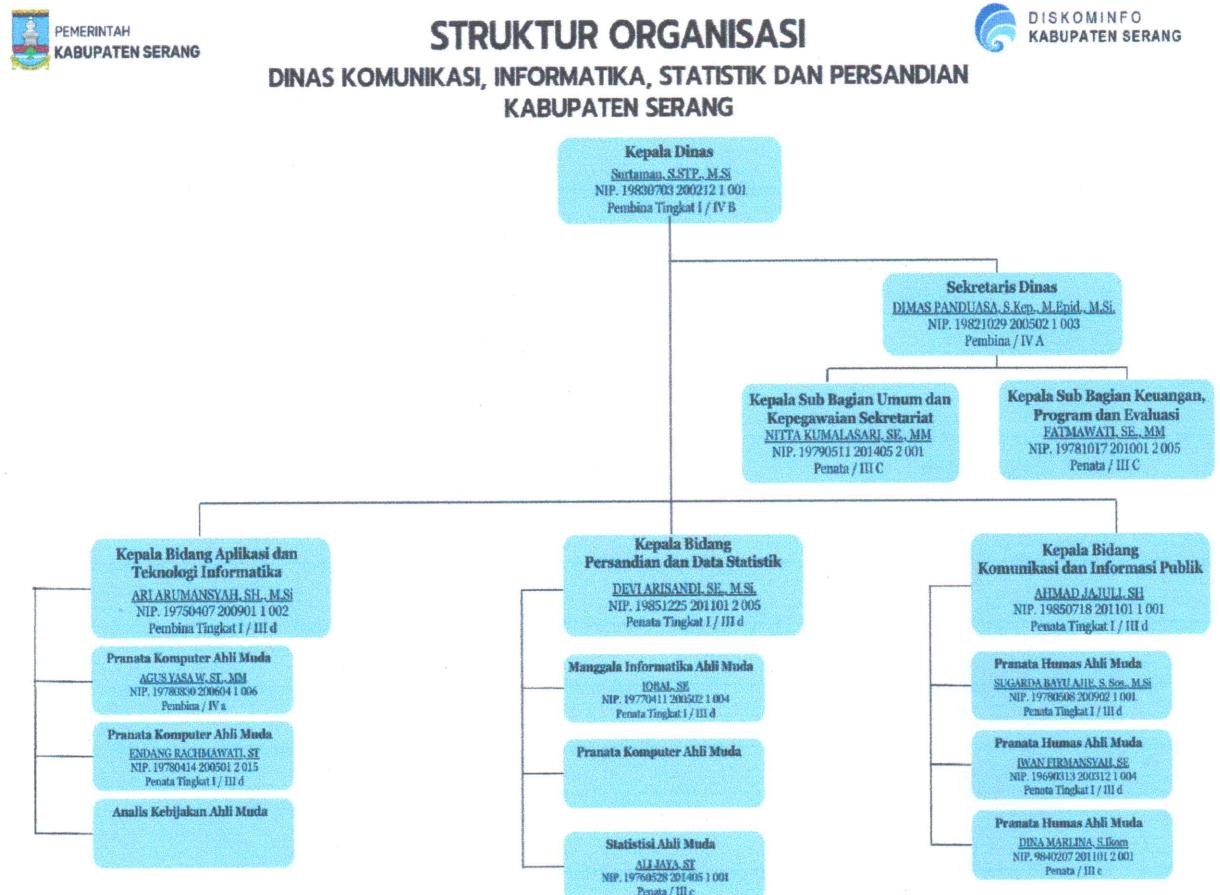
### 3. Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang memiliki struktur sebagai berikut : Pimpinan adalah Kepala Dinas yang membawahi 1 (Satu) Sekretariat, 3 (Tiga) Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang dapat dilihat pada diagram berikut ini.

GAMBAR 1.

#### STRUKTUR ORGANISASI

#### DISKOMINFO KABUPATEN SERANG TAHUN 2025

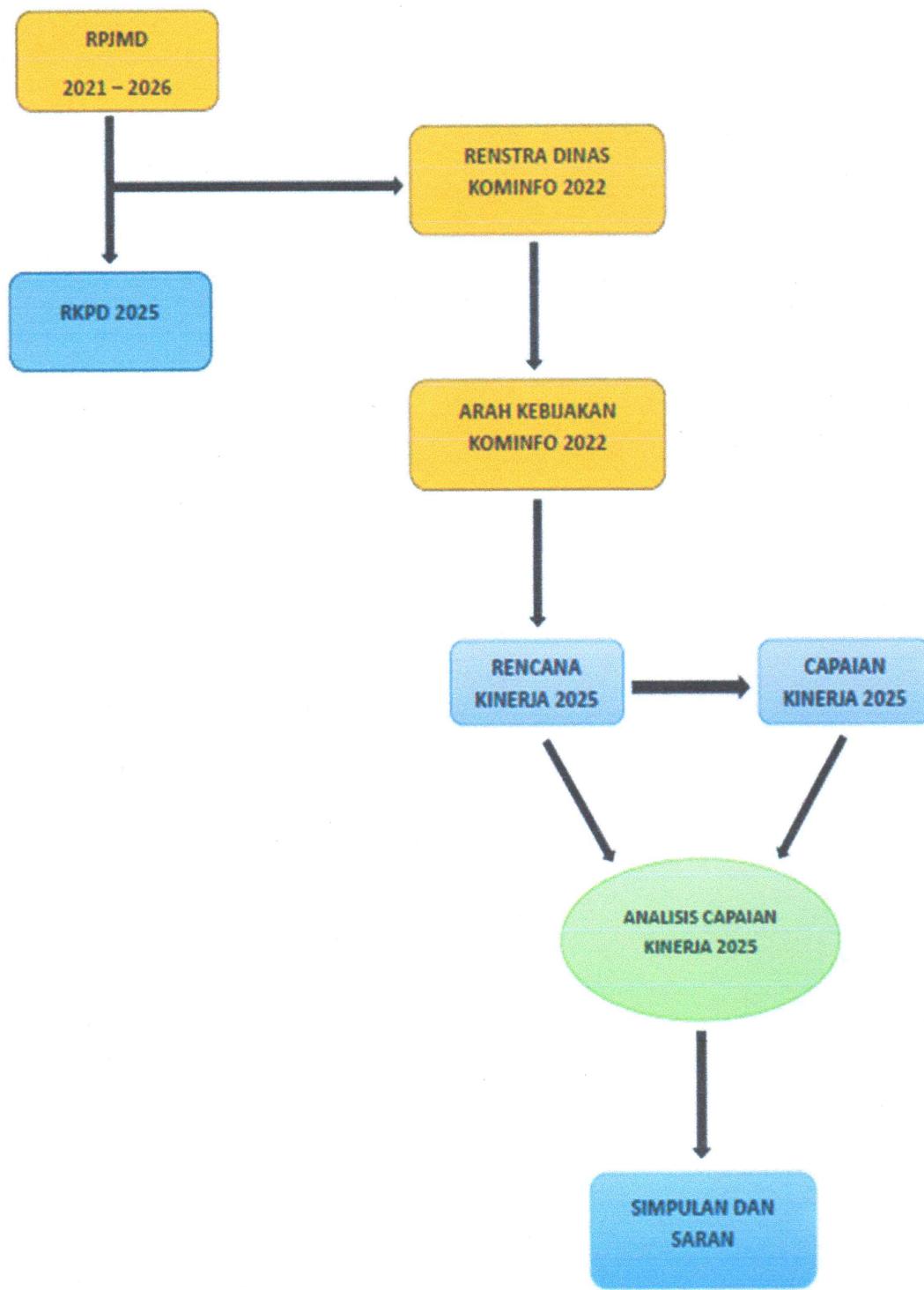


### 4. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang selama Tahun 2025. Capaian Kinerja (*performance results*) 2025 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan suatu organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang tahun 2025 dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini.

**GAMBAR 2.**  
**SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA**  
**DISKOMINFO KABUPATEN SERANG TAHUN 2025**



**1. RENCANA KINERJA 2025**

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang sesuai tugas pokok dan fungsi akan melaksanakan rencana kerja dan pendanaan dalam program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi serta melaksanakan kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi (sosialisasi *e-office*, *e-budgeting*, *e-harga* dan pengembangan *Command Center*). Dengan komitmen reformasi birokrasi ditingkat daerah akan terwujud pengembangan birokrasi yang modern bersih, berintegritas, profesional dan berkinerja tinggi, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

**1.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2025**

Tujuan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dan ada 4 (empat) sasaran yang ingin dicapai yaitu :

**Sasaran PERTAMA :**

- Sasaran : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Indikator tujuan : Tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan.

**Sasaran KEDUA :**

- Sasaran : Meningkatnya Keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI.
- Indikator tujuan : - Indeks keterbukaan informasi publik (PPID).  
- Indeks kematangan penerapan SPBE.  
- Indeks keamanan informasi (KAMI).

**Sasaran KETIGA :**

- Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi.
- Indikator tujuan : Cakupan Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan.

**Sasaran KEEMPAT :**

- Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI.
- Indikator tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

## **1.2. Program dan Kegiatan**

Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke-semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa. Rencana Kegiatan Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang sesuai review terhadap perencanaan dan penganggaran dalam Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) tersusun sebagaimana berikut:

**a. Kegiatan Rutin:**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
11. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
12. Pelayanan Publik;
13. Pengelola Media Komunikasi Publik;
14. Penyusun Strategis Komunikasi Publik;
15. Penyusun Konten;
16. Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah;
17. Penyelenggaran Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/kota;
18. Penyedia Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaran SPBE;
19. Peningkatan Peran Statistik Sektoral Terhadap Sistem Statistik Nasional;
20. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral;
21. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

**b. Kegiatan Wajib:**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
5. Penyediaan Bahan/Material;
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
7. Pengadaan Mebel;
8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
9. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik;
10. Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;
11. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik;
12. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa;
13. Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional;
14. Koordinasi penyusunan proses bisnis;
15. Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah;
16. Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah;
17. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;
18. Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi ;
19. Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo;
20. Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE ;
21. Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral;
22. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
23. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
24. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
25. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Ikhtisar Perjanjian Kinerja dan pendanaan Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang sebagaimana pada Tabel berikut ini:

**TABEL 1.**  
**IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN**  
**DISKOMINFO KABUPATEN SERANG TAHUN 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan	100%
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	85%
		Indeks Kematangan Penerapan SPBE	3,00
		Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	170
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi	Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan	90%
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B

**TABEL 2.**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**DISKOMINFO KABUPATEN SERANG TAHUN 2025**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>9.717.262.074</b>	<b>7 Kegiatan</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.360.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.409.900.000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	119.165.952	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.417.694.489	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.216.363.813	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.087.537.820	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	442.240.000	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>8.198.974.180</b>	<b>1 Kegiatan</b>
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.198.974.180	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>5.246.636.014</b>	<b>2 Kegiatan</b>
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	103.170.000	
2	Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.143.466.014	
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>524.187.936</b>	<b>1 Kegiatan</b>
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	524.187.936	
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>287.471.904</b>	<b>1 Kegiatan</b>
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	270.791.904	
	<b>JUMLAH</b>	<b>23.974.532.108</b>	

**TABEL 3.**  
**RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) 2025**  
**DISKOMINFO KABUPATEN SERANG TAHUN 2025**

PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA		
	INDIKATOR KINERJA		TARGET
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			
A <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>9.717.262.074</b>
I <b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>24.360.000</b>
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ip	Jumlah Dana	24.360.000
	Op	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
	Oc	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
II <b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>			<b>5.409.900.000</b>
2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ip	Jumlah Dana	5.409.900.000
	Op	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan
	Oc	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan
III <b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>119.165.952</b>
3 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Ip	Jumlah Dana	119.165.952
	Op	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
	Oc	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
IV <b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>			<b>1.417.694.489</b>
4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Ip	Jumlah Dana	10.557.000
	Op	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket
	Oc	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ip	Jumlah Dana	467.620.000
	Op	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket
	Oc	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Ip	Jumlah Dana	10.686.000
	Op	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Paket
	Oc	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ip	Jumlah Dana	26.556.000
	Op	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket
	Oc	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ip	Jumlah Dana	44.561.989
	Op	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket
	Oc	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ip	Jumlah Dana	13.808.000
	Op	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen
	Oc	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
10 Penyediaan Bahan / Material	Ip	Jumlah Dana	64.988.000
	Op	Tersedianya Bahan/Material	1 Paket
	Oc	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
11 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ip	Jumlah Dana	13.417.500
	Op	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
	Oc	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
12 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ip	Jumlah Dana	765.500.000
	Op	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
	Oc	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
V <b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>			<b>1.216.363.813</b>
13 Pengadaan Mebel	Ip	Jumlah Dana	1.216.363.813
	Op	Tersedianya Mebel	20 Unit
	Oc	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit

<b>VI</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>		<b>1.087.537.820</b>
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ip	Jumlah Dana
		Op	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Oc	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ip	Jumlah Dana
		Op	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Oc	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ip	Jumlah Dana
		Op	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Oc	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
<b>VII</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>		<b>442.240.000</b>
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ip	Jumlah Dana
		Op	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Oc	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ip	Jumlah Dana
		Op	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Oc	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
19	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ip	Jumlah Dana
		Op	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Oc	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>		<b>8.198.974.180</b>
<b>VIII</b>	<b>PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>8.198.974.180</b>
20	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Ip	Jumlah Dana
		Op	Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasiakan Informasi Program atau Kebijakan
		Oc	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasiakan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo
21	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Ip	Jumlah Dana
		Op	Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
		Oc	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika
22	Pelayanan Informasi Publik	Ip	Jumlah Dana
		Op	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik
		Oc	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan
23	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Ip	Jumlah Dana
		Op	Tersedianya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
		Oc	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah
24	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Ip	Jumlah Dana
		Op	Tersedianya Media Komunikasi Publik
		Oc	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis
25	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Ip	Jumlah Dana
		Op	Tersedianya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
		Oc	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun

26	Penyusunan Konten	Ip	Jumlah Dana	441.328.808
		Op	Terlaksananya Penyusunan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1220 Konten
		Oc	Jumlah Konten Informasi Publik dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1220 Konten
C	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>			<b>5.246.636.014</b>
IX	<b>PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>103.170.000</b>
27	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Ip	Jumlah Dana	103.170.000
		Op	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Domain
		Oc	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Domain
X	<b>PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>5.143.466.014</b>
28	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Ip	Jumlah Dana	6.371.000
		Op	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20 Aplikasi
		Oc	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	20 Aplikasi
29	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Ip	Jumlah Dana	124.021.054
		Op	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1 Perangkat Daerah
		Oc	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1 Perangkat Daerah
30	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Ip	Jumlah Dana	1.631.500
		Op	Terlaksananya Koordinasi penyusunan proses bisnis	1 Dokumen
		Oc	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	1 Dokumen
31	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Ip	Jumlah Dana	0
		Op	Terlaksananya Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	1 Dokumen
		Oc	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen
32	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Ip	Jumlah Dana	175.000.000
		Op	Terlaksananya Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	2 Dokumen
		Oc	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	2 Dokumen
33	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Ip	Jumlah Dana	392.976.952
		Op	Terlaksananya Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	1 Aplikasi
		Oc	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	1 Aplikasi
34	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Ip	Jumlah Dana	3.600.000
		Op	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	20 Aplikasi
		Oc	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	20 Aplikasi
35	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Ip	Jumlah Dana	145.472.000
		Op	Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	15 Layanan
		Oc	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	15 Layanan
36	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Ip	Jumlah Dana	39.840.000
		Op	Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen
		Oc	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen

37	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Ip	Jumlah Dana	16.100.000
		Op	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen
		Oc	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen
38	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Ip	Jumlah Dana	4.238.453.508
		Op	Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	1 Perangkat Daerah
		Oc	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	1 Perangkat Daerah
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>				
D	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>			<b>524.187.936</b>
XI	<b>PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>			<b>524.187.936</b>
39	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Ip	Jumlah Dana	364.420.000
		Op	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	20 Orang
		Oc	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	20 Orang
40	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Ip	Jumlah Dana	9.120.000
		Op	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	95 Persentase
		Oc	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan/atau Penyusunan Kebijakan	95 Persentase
41	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Ip	Jumlah Dana	103.901.984
		Op	Terlaksanakanya Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	95 Persentase
		Oc	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	95 Persentase
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>				
E	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>			<b>287.471.904</b>
XII	<b>PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>270.791.904</b>
42	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ip	Jumlah Dana	116.280.000
		Op	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
		Oc	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen
43	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ip	Jumlah Dana	28.800.000
		Op	Terlaksananya Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan
		Oc	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan
44	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Ip	Jumlah Dana	94.711.904
		Op	Terlaksananya Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan
		Oc	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan
45	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ip	Jumlah Dana	31.000.000
		Op	Terlaksananya Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	29 Perangkat Daerah
		Oc	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	29 Perangkat Daerah

<b>XI</b>	<b>PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>16.680.000</b>
46	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ip	Jumlah Dana
		Op	Terlaksananya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Oc	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi
<b>JUMLAH</b>			<b>23.974.532.108</b>

## 2. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Setiap sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dengan maksud, tujuan dan karakteristik program.

Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi organisasi dimana setiap kegiatan memiliki dimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan 2025 merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Atas dasar hal tersebut diatas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menjabarkan sasaran, program dan kegiatan pada masing-masing tujuan di Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 4.**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**DISKOMINFO KABUPATEN SERANG TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
<b>A</b> <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	
<b>I</b> <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
<b>II</b> <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
<b>III</b> <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	
3	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
<b>IV</b> <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10	Penyediaan Bahan / Material
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

<b>V</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
13	Pengadaan Mebel
<b>VI</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>VII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
19	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>B</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>
<b>VIII</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>
20	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
21	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
22	Pelayanan Informasi Publik
23	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
24	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
25	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
26	Penyusunan Konten
<b>C</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>
<b>IX</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>
27	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
<b>X</b>	<b>Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>
28	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
29	Koordinasi penyusunan proses bisnis
30	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
31	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
32	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
33	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
34	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
35	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
36	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
37	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
38	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
	<b>STATISTIK</b>
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>
<b>XI</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>
39	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
40	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
41	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
	<b>PERSANDIAN</b>
<b>E</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>
<b>XII</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>
42	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
43	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
44	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
45	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
<b>XIII</b>	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>
46	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

**TABEL 5.**  
**EMPAT SASARAN**  
**DISKOMINFO KABUPATEN SERANG TAHUN 2025**

No.	<b>Sasaran Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang</b>	<b>Pencapaian</b>	
		<b>Tercapai</b>	<b>Tidak Tercapai</b>
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	✓	-
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi publik yang didukung kemajuan TI	✓	-
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi	✓	-
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI	✓	-

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 89 tahun 2022, tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Secara umum, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi. Hal ini dapat tercermin dari **4 (empat) sasaran** yang secara umum telah tercapai/dapat diwujudkan dalam tahun 2025.

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2025, implementasi Perencanaan Strategis 2021-2026 mencakup pelaksanaan **5 Program, 13 Kegiatan, dan 46 Sub Kegiatan** untuk mendukung **4 sasaran strategis**. Capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2025 dapat diiktisarkan sebagai hasil pelaksanaan kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang melalui pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada target kinerja perangkat daerah selama satu tahun yaitu tahun 2025 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja yang ada dilingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang serta sebagai barometer untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2025 yang merupakan pelaksanaan program tahun ke 4 (empat) berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026.

#### 1. Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

**TABEL 6.**  
**SKALA CAPAIAN KINERJA**  
**DISKOMINFO KABUPATEN SERANG TAHUN 2025**

No.	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

## 2. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Dalam Pencapaian kinerja tahun 2025 ini dapat kita lihat seberapa jauh realisasi dari target kinerja di bidang pelayanan informasi publik, pengembangan infrastruktur teknologi dan informasi, penguatan Basis Data Pemerintahan yang terintegrasi dengan Pusat Data, dukungan pengamanan informasi dan persandian yang ada di Kabupaten Serang serta peningkatan sumber daya manusia (SDM) teknologi informasi. Berikut tabel pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2025.

TABEL 7.

### MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DISKOMINFO KABUPATEN SERANG TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	85%	99,67%	117	Sangat Tinggi
		Indeks Kematangan Penerapan SPBE	3,00	3,97	132	Sangat Tinggi
		Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	170	366	215	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi	Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan	90%	90%	100	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B(85)	B (83,24)	98	Sangat Tinggi

### 3. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

**TABEL 8.**

**MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUNINI  
DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR  
DISKOMINFO KABUPATEN SERANG TAHUN 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun	Tahun	Tahun 2025		
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	98,37%	94,60%	85%	99,67%	117
		Indeks Kematangan Penerapan SPBE	3,23	3,73	3,00	3,97	132
		Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	240	397	170	366	215
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi	Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan	70%	80%	90%	90%	100
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (81,25)	B (81,69)	B(85)	B (83,24)	98

#### **4. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

**TABEL 9.**

**MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUNINI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI**

**DISKOMINFO KABUPATEN SERANG TAHUN 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan (4/5*100)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	99,67%	90%	110,74
		Indeks Kematangan Penerapan SPBE	3,97	3,01	131,89
		Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	366	175	209,14
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi	Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan	90%	100%	90
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (83,24)	B (85)	97,92

## 5. Membandingkan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota diuraikan sebagai berikut :

**TABEL 10.**

### MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUNINI DENGAN STANDAR NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DISKOMINFO KABUPATEN SERANG TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025 Diskominfo Kabupaten Serang	Realisasi Tahun 2025 Diskominfo Provinsi Banten	Standar Kabupaten	% Capaian (Provinsi = 4/5*100 ) (Standar Kabupaten = 4/6*100)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	99,67%	96,45%	-	103
		Indeks Kematangan Penerapan SPBE	3,97	3,69	-	108
		Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	366	542	-	68
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi	Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan	90%	-	90%	100
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (83,24)	-	B (85)	B (97,92)

Disebabkan tidak adanya indikator Provinsi yang sama, maka disandingkan dengan standar kabupaten Serang.

## 6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

**TABEL 11.**

**ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU  
PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH  
DILAKUKAN**

**DISKOMINFO KABUPATEN SERANG TAHUN 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian (5/4* 100)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	85%	99,67%	85	Mengoptimalkan komunikasi dengan opd yang dimintai informasi oleh lembaga/ lsm untuk memberikan data yang bisa diberikan sesuai dengan peraturan dan perki no 1 tahun 2021 baik melalui offline atau online	Terus melibatkan komunikasi dengan opd dan membuka akses bersama Lembaga/lsm, dengan cara mempermudah akses permohonan informasi sesuai format yang sudah di sediakan
		Indeks Kematanan Penerapan SPBE	3,00	3,97	117	Terlaksananya penerapan SPBE pada aspek kebijakan, tata Kelola, manajemen dan layanan SPBE	Optimalisasi indikator yang bisa meningkat
		Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	170	366	215	Meningkatkan Kesadaran keamanan informasi	Adanya kebijakan terkait Perlindungan data pribadi (PPD)
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi	Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan	90%	90%	100	Keberhasilan ini didukung oleh meningkatnya koordinasi antar perangkat daerah dalam penyediaan data, penerapan prinsip satu data Indonesia, serta adanya portal data daerah sebagai media publikasi	Penguatan koordinasi walidata dan prosedur data serta pemrbina data, peningkatan kapasitas SDM pengelola data, optimalisasi portal data daerah, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pemyediaam dan publikasi data statistik sektoral
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (70-85)	B (83,24)	98	Memelihada dan membuat inovasi tentang alur perangkat daerah agar mampu meningkatkan kepuasan masyarakat dari mata ke mata sesuai dengan target yang ditetapkan	Terus membuat terobosan teknologi yang memudahkan dalam memperluas dan mempermudah cara komunikasi publik

## 7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**TABEL 12.**

### ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DISKOMINFO KABUPATEN SERANG TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	* Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	117	86,37	30,63
		Indeks Kematanan Penerapan SPBE	132	86,54	45,46
		Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	215	89,30	125,7
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi	Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan	100	94,95	5,05
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98	86,37	11,63

## 8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

**TABEL 13.**

### ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA DISKOMINFO KABUPATEN SERANG TAHUN 2025

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	86%		
	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	100%	Menunjang Langsung	Mendukung Pencapaian sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
		Perangkat Daerah		Pencapaian Sasaran	Strategis ke-1
	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke-1
	<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	-
	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke-1
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke-1
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke-1
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	100%	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	-

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
		Undangan yang Disediakan			
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100%	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke-1
	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	-
	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke-1
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	-
	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	81%		

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
		Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	92%	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	81%	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0%	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	-
Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Cakupan Diseminasi Informasi Pemerintah Daerah melalui Media Informasi	84%		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI		<b>PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	84%		
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasi dan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	34%	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke-2 dan 4
	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	0%	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke-2 dan 4
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik	22%	Menunjang Langsung	Mendukung Pencapaian sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
		yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		Pencapaian Sasaran	Strategis ke-2 dan 4
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	100%	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke-2 dan 4
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	100%	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke-2
	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	100%	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke-2
	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	100%	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke-2
Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	Cakupan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100%		
		Persentase Penerapan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Daerah	100%		
	<b>PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%		

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	100%	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke-2
	<b>PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	91%		
	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	100%	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke-2
	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	100%	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke-2
	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	0%	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke-2
	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	100%	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke-2
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	100%	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke-2
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke-2

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	100%	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke-2
	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	100%	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke-2
	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	100%	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke-2
	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	100%	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke-2
	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	100%	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke-2
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Tingkat Ketersediaan Statistik Sektoral Di lingkup Daerah	164%		
	<b>PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP</b>	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan	90%		

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	n Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	31%	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke-3
	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke-3
	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektorl yang rilis tepat waktu	100%	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke-3
Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	135%		
	<b>PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	88%		
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	100%	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke-2
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan	100%	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
	Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Strategis ke-2
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	100%	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke-2
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	100%	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke-2
	<b>PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Terlaksananya Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0%		
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	0%	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian sasaran Strategis ke-2

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Pagu belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang yang digunakan untuk membiayai Program/kegiatan tahun 2025 berasal dari APBD terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi dan Belanja Modal dibagi ke dalam 5 pos pengeluaran, yaitu : (1) Belanja pegawai, (2) Belanja Barang dan Jasa, (3) Belanja Hibah (4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dan (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Pos pengeluaran Belanja Pegawai yaitu pos yang dikhkususkan untuk belanja pegawai misalnya gaji, tunjangan-tunjangan, dan honor-honor. Pos pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yaitu pos pengeluaran yang meliputi belanja untuk keperluan sehari-hari kantor/kegiatan, pemeliharaan, dan perjalanan dinas sebagai penunjang kegiatan. Pos pengeluaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yaitu pos pengeluaran yang meliputi kegiatan pengadaan sarana prasarana yang merupakan aset tetap.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp. 9.717.262.074,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.691.474.780,- kegiatan program ini terdiri dari;**
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pagu anggaran Rp 24.360.000,- . Outcome dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan serapan Rp. 4.540.000,- (18,64%);
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Pagu anggaran Rp. 5.409.900.000,- . Outcome kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan serapan Rp. 5.236.687.923,- (96,80%);
  - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, Pagu anggaran Rp. 119.165.952,- . Outcome dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan serapan anggaran Rp. 47.695.456,- (40,02%);
  - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pagu anggaran Rp. 1.417.694.489,- . Outcome dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan serapan sebesar Rp. 1.266.200.738,- (89,31%);
  - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pagu anggaran Rp. 1.216.363.813,- . Outcome dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan serapan sebesar Rp. 723.953.222,- (59,52%);

- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pagu anggaran Rp. 1.087.537.820,- . Outcome dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan serapan anggaran Rp. 1.019.718.385,- (93,76%);
  - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pagu anggaran Rp. 442.240.000,- . Outcome dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan serapan anggaran Rp. 392.679.056,- (88,79%).
- 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, pagu anggaran Rp. 8.198.974.180,- dengan realisasi anggaran Rp. 7.081.240.791,- (86,37%), kegiatan program ini terdiri dari;**
- a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pagu anggaran Rp. 8.198.974.180,- . Outcome dari kegiatan ini adalah Indeks Keterbukaan Informasi Publik & Cakupan Diseminasi Pemerintah Daerah melalui Media Informasi, dengan serapan anggaran Rp. 7.081.240.791,- (86,37%).
- 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dengan pagu anggaran Rp. 5.246.636.014,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.540.305.428,- (86,54%), kegiatan program ini terdiri dari;**
- a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub-Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pagu anggaran Rp 103.170.000,- . Outcome dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan serapan anggaran Rp. 96.853.500,- (93,88%);
  - b. Kegiatan Pengelolaan *e-Government* dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pagu anggaran Rp. 5.143.466.014,- . Outcome dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan *e-government* Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan serapan anggaran Rp. 4.443.451.928,- (86,39%).
- 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan pagu anggaran Rp. 524.187.936,- realisasi anggaran Rp. 497.731.229,- (94,95%), kegiatan program ini terdiri dari;**
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Pagu anggaran Rp. 524.187.936,- . Outcome dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan serapan anggaran Rp. 497.731.229,- (94,95%).

**5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, pagu anggaran 287.471.904,- dengan realisasi anggaran 256.720.404,- (89,30%), kegiatan program ini terdiri dari;**

a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pagu anggaran Rp. 270.791.904,- . Outcome dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan serapan anggaran Rp. 248.130.404,- (91,63%);

Pagu belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang yang digunakan untuk membiayai Program/kegiatan tahun 2025 berasal dari APBD terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi dan Belanja Modal dibagi ke dalam 5 pos pengeluaran, yaitu : (1) Belanja pegawai; (2) Belanja Barang dan Jasa; (3) Belanja Hibah; (4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin; (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Pos pengeluaran Belanja Pegawai yaitu pos yang dikhususkan untuk belanja pegawai misalnya gaji, tunjangan-tunjangan, dan honor-honor. Pos pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yaitu pos pengeluaran yang meliputi belanja untuk keperluan sehari-hari kantor/kegiatan, pemeliharaan, dan perjalanan dinas sebagai penunjang kegiatan. Pos pengeluaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yaitu pos pengeluaran yang meliputi kegiatan pengadaan sarana prasarana yang merupakan aset tetap. Alokasi untuk pos-pos pengeluaran tersebut berikut realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL 14.**

**DAFTAR ALOKASI RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN**

**DISKOMINFO KABUPATEN SERANG TAHUN 2025**

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)			%
		Rencana	Realisasi		
I	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5.409.900.000</b>	<b>5.236.687.923</b>	<b>96,80</b>	
	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>5.409.900.000</b>	<b>5.236.687.923</b>	<b>96,80</b>	
	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>5.405.328.000</b>	<b>5.045.472.623</b>	<b>93,34</b>	
	Belanja Gaji Pokok PNS	1.452.000.000	1.416.800.495	97,58	
	Belanja Gaji Pokok PPPK	68.000.000	61.728.733	90,78	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	131.000.000	127.161.652	97,07	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	167.000.000	159.510.000	95,51	
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	10.999.996	8.610.000	78,27	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	34.000.000	31.525.000	92,72	
	Belanja Tunjangan Beras PNS	81.000.000	76.475.520,	94,41	
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.000.000	1.442.365	48,08	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	29.500.000	8.955.705	30,36	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	100.000	22.856	22,86	
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	100.004	864	0,86	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	139.000.000	128.085.025	92,15	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.000.000	2.526.540	84,22	

	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.000.000	2.872.367	71,81
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.000.000	133.419	6,67
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	10.000.000	8.617.143	86,17
	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	2.000.000	400.239	20,01
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	7.700.000	0	0,00
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1.000.000	0	0,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.028.500.000	1.995.500.000	98,37
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.235.000.000	1.206.320.000	97,68
<b>II</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.340.771.430</b>	<b>10.775.805.698</b>	<b>87,32</b>
	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>24.360.000</b>	<b>4.540.000</b>	<b>18,64</b>
	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>24.360.000</b>	<b>4.540.000</b>	<b>18,64</b>
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.980.000	0	0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0	0	0,00
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	0	0	0,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0	0	0,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0	0	0,00
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0	0	0,00
	Belanja Lembur	22.380.000	4.540.000	20,29
	<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>119.165.952</b>	<b>47.695.456</b>	<b>40,02</b>
	<b>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>119.165.952</b>	<b>47.695.456</b>	<b>40,02</b>
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	116.640.000	45.380.000	38,91
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.331.552	2.137.256	91,67
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	86.400	79.200	91,67
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	108.000	99.000	91,67
	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>1.417.694.489</b>	<b>1.266.200.738</b>	<b>89,31</b>
	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>10.557.000</b>	<b>10.513.798</b>	<b>99,59</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	10.557.000	10.513.798	99,59
	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>467.620.000</b>	<b>459.214.998</b>	<b>98,20</b>
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	49.960.000	49.950.000	99,98
	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>10.686.000</b>	<b>10.267.842</b>	<b>96,09</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10.286.000	10.267.842	99,82
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	400.000	0	0,00
	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>26.556.000</b>	<b>11.298.200</b>	<b>42,54</b>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.556.000	11.298.200	42,54
	<b>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</b>	<b>44.561.989</b>	<b>32.025.137</b>	<b>71,87</b>

	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	39.261.989	26.725.137	68,07
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.300.000	5.300.000	100,00
	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>13.808.000</b>	<b>11.705.760</b>	<b>99,90</b>
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.808.000	11.705.760	84,78
	<b>Penyediaan Bahan/Material</b>	<b>64.988.000</b>	<b>64.470.000</b>	<b>99,20</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	43.388.000	42.870.000	98,81
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	21.600.000	21.600.000	100,00
	<b>Fasilitasi Kunjungan Tamu</b>	<b>13.417.500</b>	<b>9.287.614</b>	<b>69,22</b>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	480.000	0	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.937.500	9.287.614	71,79
	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>765.500.000</b>	<b>657.417.389</b>	<b>85,88</b>
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	654.000.000	590.707.389	90,32
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	111.500.000	66.710.000	59,83
	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>1.087.537.820</b>	<b>1.019.718.385</b>	<b>93,76</b>
	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>196.601.664</b>	<b>187.239.680</b>	<b>95,24</b>
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	153.360.000	151.230.000	98,61
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	16.320.864	15.543.680	95,24
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	561.600	518.400	92,31
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	702.000	648.000	92,31
	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>507.836.396</b>	<b>480.018.582</b>	<b>94,52</b>
	Belanja Tagihan Air	16.254.500	7.319.500	45,03
	Belanja Tagihan Listrik	161.581.896	142.699.082	88,31
	Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	330.000.000	330.000.000	100,00
	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>383.099.760</b>	<b>352.460.123</b>	<b>92,00</b>
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	36.000.000	35.964.000	99,90
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	86.330.000	80.483.367	93,23
	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.300.000	11.999.988	97,56
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	131.760.000	107.800.000	81,82
	Belanja Jasa Tenaga Supir	28.080.000	28.080.000	100,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	11.657.760	11.269.168	96,67
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	432.000	417.600	96,67
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	540.000	522.000	96,67
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	76.000.000	75.924.000	99,90
	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>442.240.000</b>	<b>392.679.056</b>	<b>88,79</b>
	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>267.480.000,</b>	<b>251.656.040</b>	<b>94,08</b>
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	17.000.000	10.635.000	62,56

	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	250.480.000	241.021.040	96,22
	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>174.760.000</b>	<b>141.023.016</b>	<b>80,70</b>
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	13.230.000	7.249.998	54,80
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	60.240.000	60.134.400	99,82
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	65.000.000	38.850.000	59,77
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	18.250.000	17.784.215	97,45
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	9.760.000	9.504.513	97,38
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	18.250.000	17.784.215	97,45
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	8.280.000	7.499.890	90,58
	<b>Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0	0	0,00
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0	0	0,00
	<b>PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.198.974.180</b>	<b>7.081.240.791</b>	<b>86,37</b>
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	14.480.000	4.934.000	34,07
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.480.000	1.134.000	25,31
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.000.000	3.800.000	38,00
	<b>Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</b>	0	0	0,00
	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	0	0	0,00
	<b>Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik</b>	<b>149.839.000</b>	<b>149.561.400</b>	<b>99,81</b>
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	99.839.000	99.733.500	99,89
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	50.000.000	49.827.900	99,66
	<b>Pengelolaan Media Komunikasi Publik</b>	<b>6.363.166.000</b>	<b>5.493.988.548</b>	<b>86,34</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	104.522.000	66.749.784	63,86
	Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan	6.252.500.000	5.421.094.764	86,70
	Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	6.144.000	6.144.000	100,00
	<b>Pelayanan Informasi Publik</b>	<b>208.107.856</b>	<b>175.874.384</b>	<b>84,51</b>
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	27.630.000	0	0,00
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	63.900.000	61.770.000	96,67
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.260.000	4.260.000	100,00

	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.994.656	5.634.584	80,56
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	259.200	208.800	80,56
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	324.000	261.000	80,56
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	108.000.000	108.000.000	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000	0	0,00
	<b>Penyusunan Strategi Komunikasi Publik</b>	<b>1.022.052.516</b>	<b>870.239.791</b>	<b>85,15</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	145.544.800	145.471.372	99,95
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	10.100.000	10.100.000	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	25.560.000	25.560.000	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	410.290.000	311.850.000	76,01
	Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan	196.000.000	194.943.750	99,46
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.403.000	7.283.959	70,02
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	30.310.176	23.315.520	76,92
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.123.200	864.000	76,92
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.404.000	1.080.000	76,92
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	149.948.840	149.771.190	99,88
	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	8.710.000	0	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	0	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0,00
	<b>Penyusunan Konten</b>	<b>441.328.808</b>	<b>386.642.668</b>	<b>87,61</b>
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	3.786.200	3.403.200	89,88
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	540.000,	0	0,00
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5.400.000	0	0,00
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	114.300.000	105.300.000	92,13
	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	164.268.000	155.748.000	94,81
	Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan	5.000.000	5.000.000	100,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.206.208	9.739.776	79,79
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	518.400	423.912	81,77
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	648.000	529.884	81,77
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	90.000.000	89.997.896	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000	0	0,00
	<b>PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.246.636.014</b>	<b>4.540.305.428</b>	<b>86,54</b>

	<b>Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa</b>	<b>103.170.000</b>	<b>96.853.500</b>	<b>93,88</b>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.400.000	6.388.000	99,81
	Belanja Jasa Kantor	83.770.000	78.005.500	93,12
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	83.700.000	77.950.000	93,13
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	70.000	55.500	79,29
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.000.000	11.460.000	95,50
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000	1.000.000	100,00
	<b>PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.143.466.014</b>	<b>4.443.451.928</b>	<b>86,39</b>
	<b>Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional</b>	<b>6.371.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	851.000	0	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.920.000	0	0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000	0	0,00
	<b>Koordinasi penyusunan proses bisnis</b>	<b>1.631.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.004.500	0	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	627.000	0	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	0	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0,00
	<b>Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0	0	0,00
	<b>Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah</b>	<b>175.000.000</b>	<b>172.494.000</b>	<b>98,57</b>
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	175.000.000	172.494.000	98,57
	<b>Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah</b>	<b>392.976.952</b>	<b>342.804.572</b>	<b>87,23</b>
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0	0	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.995.000	1.984.500	99,47
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	25.560.000	25.560.000	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	240.000.000	240.000.000	100,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	11.931.552	11.931.552	100,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	662.400	662.400	100,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	828.000	828.000	100,00
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	100.000.000	49.946.670	49,95
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.000.000	11.891.450	99,10

	<b>Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah</b>	3.600.000	0	0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000	0	0,00
	<b>Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota</b>	124.021.054	121.648.704	98,09
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.722.350	0	0,00
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	25.560.000	25.560.000	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	24.000.000	24.000.000	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	54.000.000	54.000.000	100,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.623.104	5.623.104	100,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	273.600	273.600	100,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	342.000	342.000	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.000.000	6.000.000	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.500.000	5.850.000	90,00
	<b>Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi</b>	145.472.000	133.714.000	91,92
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0	0	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.120.000	5.112.000	99,84
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000	3.600.000	100,00
	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	37.752.000	26.662.200	70,62
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.000.000	23.414.800	97,56
	<b>Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo</b>	39.840.000	35.913.600	90,14
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.840.000	0	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16.000.000	16.000.000	100,00
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0	0	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.000.000	17.913.600	99,52
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000	2.000.000	100,00
	<b>Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE</b>	16.100.000	13.853.600	86,05
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000	1.800.000	50,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.000.000	11.553.600	96,28
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	500.000	500.000	100,00
	<b>Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE</b>	4.238.453.508	3.623.023.452	85,48
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.203.500	0	0,00

	Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	4.000.000.008	3.395.806.452	84,90
	<b>PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>524.187.936</b>	<b>497.731.229</b>	<b>94,95</b>
	<b>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral</b>	<b>364.420.000</b>	<b>359.826.650</b>	<b>98,74</b>
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0	0	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.920.000	0	10,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0	0	0,00
	Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan	247.500.000	247.500.000	100,00
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0	0	0,00
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	95.000.000	94.810.650	99,80
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.000.000	11.466.000	95,55
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.000.000	6.050.000	75,62
	<b>Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional</b>	<b>55.865.952</b>	<b>41.913.952</b>	<b>75,03</b>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.280.000	7.280.000	100,00
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0	0	0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000	0	0,00
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	25.560.000	25.560.000	100,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.331.552	2.331.552	100,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	86.400	86.400	100,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	108.000	108.000	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.000.000	2.883.000	24,02
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.500.000	3.665.000	48,87
	<b>Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral</b>	<b>103.901.984</b>	<b>95.990.627</b>	<b>92,39</b>
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.000.000	14.500.041	96,67
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.680.000	5.120.000	66,67
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000	1.800.000	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	8.520.000	8.520.000	100,00
	Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan	0	0	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	777.184	777.184	100,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	28.800	28.800	100,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	36.000	36.000	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.000.000	18.000.000	91,73

	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.500.000	4.740.602	63,21
	<b>PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>270.791.904</b>	<b>248.130.404</b>	<b>91,63</b>
	<b>Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>116.280.000</b>	<b>115.916.500</b>	<b>99,69</b>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.344.000	0	0,00
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	8.000.000	4.500.000	56,25
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.000.000	6.000.000	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	359.436	359.436	100,00
	<b>Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>28.800.000</b>	<b>17.200.000</b>	<b>59,72</b>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.400.000	0	0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.200.000	0	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.000.000	12.000.000	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.200.000	5.200.000	100,00
	<b>Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</b>	<b>94.711.904</b>	<b>90.438.904</b>	<b>95,49</b>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.560.000	0	0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.100.000	3.400.000	66,67
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0	0	0,00
	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	72.000.000	72.000.000	100,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.663.104	4.663.104	100,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	172.800	172.800	100,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	216.000	216.000	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.000.000	5.012.000	83,53
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000	4.975.000	99,50
	<b>Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>31.000.000</b>	<b>24.575.000</b>	<b>79,27</b>
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0	0	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.400.000	6.400.000	100,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.100.000	3.700.000	36,63
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.000.000	12.000.000	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000	2.500.000	99,00
	<b>PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>16.680.000</b>	<b>8.590.000</b>	<b>51,50</b>
	<b>Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>16.680.000</b>	<b>8.590.000</b>	<b>51,50</b>
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0	0	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.280.000	0	0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000	0	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.000.000	4.640.000	77,33
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000	3.950.000	98,75

<b>III</b>	<b>BELANJA HIBAH</b>			
	-			
<b>IV</b>	<b>BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>2.064.154.313</b>	<b>1.495.816.220</b>	<b>72,47</b>
	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>1.417.694.489</b>	<b>1.266.200.738</b>	<b>89,31</b>
	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>467.620.000</b>	<b>459.214.998</b>	<b>98,20</b>
	Belanja Modal Mesin Proses	6.300.000	6.100.001	96,83
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0	0	0,00
	Belanja Modal Alat Pembersih	8.930.000	4.750.000	53,19
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	28.560.000	28.560.000	99,79
	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan / Peralatan Ukur Tanah	0	0	0,00
	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	0	0	0,00
	Belanja Modal Personal Computer	290.530.000	290.299.998	99,92
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	8.500.000	5.215.000	61,35
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	74.840.000	74.399.999	99,41
	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>1.216.363.813</b>	<b>723.953.222</b>	<b>59,52</b>
	<b>Pengadaan Mebel</b>	<b>1.216.363.813</b>	<b>723.953.222</b>	<b>59,52</b>
	Belanja Modal Mebel	1.216.363.813	723.953.222	59,52
	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0	0	0,00
	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0	0	0,00
	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0	0	0,00
	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0	0	0,00
	<b>PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.198.974.180</b>	<b>7.081.240.791</b>	<b>86,37</b>
	<b>Penyusunan Strategi Komunikasi Publik</b>	<b>1.022.052.516</b>	<b>870.239.791</b>	<b>85,15</b>
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	21.056.000	0	0,00
	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	11.602.500	0	0,00
	Belanja Modal Personal Computer	0	0	0,00
	<b>Penyusunan Konten</b>	<b>441.328.808</b>	<b>386.642.668</b>	<b>87,61</b>
	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.800.000	0	0,00
	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	4.742.000,	0	0,00
	Belanja Modal Personal Computer	33.520.000	16.500.000	49,22
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0	0	0,00
	<b>PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>811.560.000</b>	<b>811.560.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi</b>	<b>145.472.000</b>	<b>133.714.000</b>	<b>91,92</b>
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	75.000.000	74.925.000	99,90
	<b>Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE</b>	<b>4.238.453.508</b>	<b>3.623.023.452</b>	<b>85,48</b>
	Belanja Modal Peralatan Jaringan	129.750.000	121.128.750	93,36
	Belanja Modal Peralatan Jaringan	106.500.000	106.088.250	99,61
	<b>PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>524.187.936</b>	<b>497.731.229</b>	<b>94,95</b>
	<b>Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral</b>	<b>103.901.984</b>	<b>95.990.627</b>	<b>92,39</b>
	Belanja Modal Personal Computer	44.560.000	43.956.000	98,64

V	BELANJA MODAL ASET LAINNYA	1.600.000	0	0,00
	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.198.974.180	7.081.240.791	86,37
	Penyusunan Konten	441.328.808	386.642.668	87,61
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	1.600.000	0	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>23.974.532.108</b>	<b>21.067.472.632</b>	<b>87,87</b>

Dari total pagu anggaran belanja Rp. 23.974.532.108,- dengan rincian pagu Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.409.900.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 16.500.477.795,- Belanja Hibah Rp. 0,- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 2.064.154.313,- dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp. 1.600.000,- dengan realisasi anggaran sebagai berikut : Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.236.687.923,- (96,80%), Belanja Barang dan Jasa Rp. 14.334.968.489,- (86,88%), Belanja Hibah Rp. 0,00,-, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.495.816.220,- (72,47%), dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp. 1.600.000,- (0,00%).

Alokasi untuk pos-pos belanja langsung tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel dan selanjutnya sajian berikut ini memperlihatkan daya serap anggaran pada belanja langsung Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang berdasarkan Program.

#### TABEL 15.

#### PERSENTASE DAYA SERAP BERDASARKAN PROGRAM.

#### DISKOMINFO KABUPATEN SERANG TAHUN 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA		%
		TARGET	REALISASI	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.717.262.074	8.691.474.780	89,44
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	8.198.974.180	7.081.240.791	86,37
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	5.246.636.014	4.540.305.428	86,54
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	524.187.936	497.731.229	94,95
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	287.471.904	256.720.404	89,30
<b>JUMLAH</b>		<b>23.974.532.108</b>	<b>21.067.472.632</b>	<b>87,87</b>

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang, terdapat tiga urusan yaitu Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, ketiga urusan tersebut telah terlaksana dengan baik dan tercapai target kinerjanya.

**1. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang kepada semua elemen masyarakat dan pihak - pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan pembangunan dalam bidang komunikasi dan informasi di Kabupaten Serang.

Berdasarkan uraian, penjelasan, dan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang sudah dapat memenuhi seluruh sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dari 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan, pada umumnya telah berhasil dicapai dengan baik. Dari **46 kegiatan** yang direncanakan dapat terselenggara dengan baik, dimana indikator kinerja perencanaan yang mencakup *input*, *output*, *outcome*, dan *benefit* yang direncanakan dapat direalisasikan dengan capaian kinerja organisasi sebesar **87,87%**.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, pada umumnya dapat dilaksanakan. Rencana Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan penyusunan kebijakan dapat dilaksanakan dengan dukungan dana dari APBD. Pada beberapa sisi masih ada kelemahan dan perlu diperbaiki dan ditingkatkan pada tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu layanan informasi publik secara cepat, efektif, dan efisien, meningkatnya infrastruktur IT dan SDM Telematika dalam penerapan *e-Government/SPBE*, dan terlaksananya penguatan basis data pemerintahan yang terintegrasi dengan Pusat Data, serta dukungan pengamanan informasi dan persandian dalam rangka mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Serang sesuai dengan RPJMD dan Renstra Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2021 - 2026.

## **2. SARAN**

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2025 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang, ada beberapa hal yang kiranya masih relevan sebagai bahan masukan. Hal tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan aturan yang ada;
2. Meningkatkan pemahaman tugas sebagai pelayan dalam bidang komunikasi publik di Kabupaten Serang;
3. Meningkatkan disiplin dalam rangka membangun diri sendiri (*self building*).
4. Perlu adanya sinkronisasi kegiatan antara Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta lembaga terkait lainnya untuk menghindari tidak tumpang tindih dan menjadi lebih sinergis;
5. Pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam pengembangan informasi dan komunikasi perlu lebih ditingkatkan lagi, baik pemikiran, kegiatan, maupun bantuan dana;
6. Dalam Misi 5 RPJMD 2021 - 2026 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten dan Profesional dengan tujuan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam kaitan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan informasi publik tersebut, Dinas Kominfo Kab. Serang belum memiliki gedung kantor yang representatif sebagai infrastruktur utama dalam hal pelayanan informasi publik. Diharapkan pihak terkait dalam hal perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah dapat memperhatikan kebutuhan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang mendatang.

# LAMPIRAN

## PERJANJIAN KINERJA

### DISKOMINFO KABUPATEN SERANG TAHUN 2025

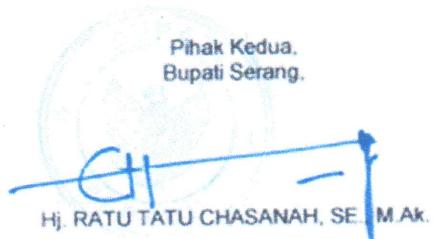
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**  
**KABUPATEN SERANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah  Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI	Tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan  Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID) Indeks Kematangan Penerapan SPBE Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	100%  85% 3,00 170
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi	Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan	90%
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B

Nu.	Program	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.204.798.184
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	5.935.623.940
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	5.599.401.204
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	569.587.064
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	374.768.064
	Jumlah	20.684.178.456

Serang, Januari 2025

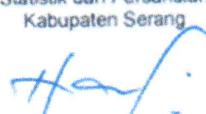
Pihak Kedua.  
Bupati Serang.



Hj. RATU TATU CHASANAH, SE., M.Ak.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,  
Statistik dan Persandian  
Kabupaten Serang

Dr. H. HAEROFIATNA, S.Kom., M.Si.  
NIP. 19800620 200604 1 016





## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK,  
DAN PERSANDIAN KABUPATEN SERANG